

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *PUBLIC RELATION* DALAM PEMBUATAN SIM DI SATUAN LALU LINTAS POLRES DI KABUPATEN BONE

A. Jumriati<sup>1\*</sup>, Anwar Parawangi<sup>2</sup>, Muhammad Yahya<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*His study purposed to find out the effectiveness of the implementation of public relations in making driver's license at the Traffic Police Unit in Bone Regency, using qualitative research methods, the number of informants in the study were 8 people. The results of the study showed that 1) the achievement of public relations goals consisted of providing socialization of the importance of driver's license to the community, visited to elementary schools as a preventive measure or rare, providing information when making driver's license directly, but the purpose of public relations had not been implemented evenly because some people did not know the form of public relations carried out. 2) The timing of public relations carried out by the Traffic Unit of the Bone Regency Police was on time, understanding their duties and responsibilities. However, some people felt that the implementation of public relations was not in accordance with the reality because it took a long time to make driver's license. 3) The benefits of public relations had not been fully achieved because traffic awareness was still lacking and the level or number of ticketing was still high and some people had not felt the benefits of public relations and making driver's license was not in accordance with management because it exceeded one day.*

**Keywords:** *effectiveness, public relations, sim*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone, menggunakan metode penelitian kualitatif, jumlah informan dalam penelitian yaitu 8 orang. Hasil penelitian yaitu 1) pencapaian tujuan *public relation* terdiri dari pemberian sosialisasi pentingnya SIM kepada masyarakat, kunjungan ke sekolah SD sebagai upaya atau langkah preventif, memberikan informasi pada saat pembuatan SIM secara langsung, namun tujuan *public relation* belum terlaksana secara merata karena beberapa masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan. 2) Ketepatan waktu *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat pada waktunya, memahami tugas dan tanggung jawabnya. Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM memakan waktu yang lama. 3) Manfaat dari *public relation* belum tercapai sepenuhnya karena kesadaran berlalu lintas masih kurang dan tingkat atau jumlah tilang masih tinggi dan beberapa masyarakat belum merasakan manfaat *public relation* dan pembuatan SIM tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari.

**Kata kunci:** *efektivitas, public relation, sim*

---

\* ajumrianti@gmail.com

## PENDAHULUAN

Persaingan yang begitu ketat di era ini dan juga penuh dengan tantangan maka pemerintah harus bisa menyediakan bentuk pelayanan kepada masyarakatnya dengan sebaik-baik mungkin. Salah satu faktor tingkat keberhasilan pemerintah dengan melayani masyarakatnya sebagai bentuk dari kualitas pelayanan yang baik. pada umumnya hukum yang dibuat pemerintahan digunakan untuk mengatur masyarakat untuk selalu patuh terhadap pemerintah. Masyarakat yang dimaksud yaitu semua masyarakat yang mengeluarkan tuntutan kepada pemerintahannya dalam pemenuhan kualitas dalam pelayanan masyarakatnya. Dasarnya yang menjadi kunci keberhasilan salah satunya yaitu kepolisian bisa dilihat dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat atau bisa dikatakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat menjadi titik tolak atau ukuran masyarakat guna pencapaian bentuk pelayanan maka harus ada cara untuk membangun komunikasi.

Ketika membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat maka akan menjadi bagian dari bentuk pemberian pelayanan. *Public relation* atau hubungan

masyarakat kunci terpenting agar bisa menjaga mutu, maka dari itu komunikasi sangat penting dilakukan dan dijaga.

Ketika berbicara tentang *public relation* merupakan sebuah bidang yang sangkutannya sangat luas di berbagai pihak. Tidak hanya menjual senyum ataupun melakukan propaganda dengan tujuan mendapatkan keuntungan sendiri ataupun melakukan pendekatan melalui pers yang bertujuan untuk mendatkan sebuah berita bagian dari *public Relation*. Lebih dari itu *public relation* merupakan bagian dari fungsi strategi guna melakukan komunikasi agar bisa mendapatkan pemahaman dan juga mendapatkan penerimaan dari publik tersebut.

Ketika dilihat dari asal katanya *public relation* di dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi satu kelompok yang terdapat di masyarakat yang memiliki bentuk perhatian yang memperhatikan sesuatu yang sama. Adanya minat dan pastinya kepentingan dari kelompok itu yang memiliki sifat heterogen yang di dalam kelompok itu memiliki sifat homogen. Homogenitas itulah yang dinamakan "*public*". Seperti orang ataupun benda, sebuah Lembaga ataupun kelompok besar merupakan minat dan juga perhatian dari *public*. *Public* bisa dikatakan adalah grup yang

kecil yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang jumlahnya tergolong sedikit atau bisa juga dalam kelompok yang besar. Kepemilikan rasa solid di dalam kelompok ini biasanya dimiliki individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Dalam kelompok tersebut individu-individu tersebut tidak terikat dengan *structural* yang nyata dan di dalam suatu tempat ataupun ruang yang tidak memiliki hubungan.

Ketika kata dari "*relations*" yang ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesianya yaitu hubungan jika dikaitkan dengan *public relation*, maka kata dari "hubungan" akan menjadi jamak, sehingga hubungan yang memiliki nilai *interest* oleh pihak tertentu atau bisa dikatakan menjadi kepentingan yang memiliki kesamaan dalam suatu hal sehingga terjalin hubungan yang diantara pihak dengan sifat dua arah, memilik timbal balik dan juga pastinya memberikan keuntungan

Antara *advertising* dan *public relation* yang dikenal pada saat ini itu sangat jauh berbeda, namun kedua itu sama-sama menjadi sarana dalam memperkenalkan produk dari sebuah perusahaan maupun Lembaga. Jika dilihat dari sisi yang berbeda *public relation* menjadi aspek manajemen yang begitu penting guna mengakhiri terjadinya sebuah krisis di dalam

kegiatan baik itu internal atau eksternal dalam sebuah perusahaan ataupun di Lembaga tertentu sehingga mengapa *public relation* menjadi penting. Dilihat dari keberadaannya *public relation* menjadi jembatan penghubung *corporate* dengan *public*. Ketika dilihat pada umumnya *public relation* hadir agar dapat memberikan, memelihara hubungan *corporate* dengan *public* sehingga terwujud hubungan harmonis sehingga dengan tercapainya itu maka menjadi bagian dari tujuan adanya *public relation*.

Menurut Ruslan (Robani, 2016) menjelaskan bahwa pengertian *public relation* beragam karena ada penyebabnya. Pertama, didasari atas sudut pandang merekamengenai *public relation*. Kedua, perbedaan didasarkan pada latar belakang, seperti definisi yang dikemukakan akademisi yang berada di perguruan tinggi akan sangat berbeda ketika definisi dikeluarkan oleh praktisi *public relation*. Ketiga, diindikasikan bahwa teoritis ataupun praktisnya tentang *public relation* atau sering juga disebut dengan kehumasan ini bisa jadi bersifat dinamis dan bersifat fleksibel karena mengikuti perkembangan dari dinamika kehidupan bermasyarakat yang pastinya mengikuti kehidupan bermasyarakat, kemajuan zaman yang terus menerus dan

terkhusus bagi era global saat ini yang telah memasuki millennium ketiga.

Menurut Cutlip dan Center (Robani, 2016) menjelaskan defenisi *public relation* terjadi dikarenakan ada komunikasi yang dilakukan secara dua arah guna mempengaruhi pendapat ataupun kegiatan yang harusnya bertanggung jawab, ketika itu terjadi maka akan tercipta *efective public relation*. Menurut Jefkins (Yulianita, 1999) *public relation* sebagai pencapaian tujuan yang begitu spesifik didasarkan dari saling pengertian yang terdiri dari keseluruhan komunikasi yang sudah direncanakan yang meliputi komunikasi keluar dan juga komunikasi kedalam. Menurut Widjaja (Robani, 2016) *public relation* bagian dari proses adanya interaksi guna tercapainya opini publik yang dimana terdapat input yang seharusnya mengentungkan kedua pihak dengan cara penanaman pengertian, menumbung kembangkan motivasi dan tak lupa adanya partisipasi public yang bertujuan agar adanya penanaman keinginan yang kuat, adanya bentuk kepercayaan dan tentunya citra dari publik itu.

Menurut Maria (Robani, 2016) *public relation* sebagai fungsi khusus dari manajemen yang bertugas dalam membantu ketika pembangunan dan melakukan pemeliharaan komunikasi

antara keduanya, memberi dukungan dan juga berkerja sama dengan meilbatkan masalah-masalah tentang manajemen, membantu dan mengetahui dan harus merespon opini dari publik, pemanfaatan perubahan dengan efektif yang digunakan agar menjadi sistem peringatan awal guna mengantisipasi adanya tren.

Menurut Cutlip And Center (Robani, 2016), *public relation* sebagai bagian dari fungsi manajemen untuk menilai dari sikap publik, melakukan pengidentifikasian kebijakan dan juga sebagai tata cara orang ataupun organisasi untuk kepentingan publik dan juga melakukan perencanaan serta melakukan program kegiatan guna mendapatkan pengertian dan juga adanya dukungan publik. Ciri-ciri *public relation* yaitu 1) Komunikasi di sebuah organisasi akan terjadi secara timbal balik dan itu merupakan bagian dari Humas. 2) Adanya Humas menjadi penunjang dari tercapainya tujuan yang sdah ditetapkan. 3) Publik intern dan ekstern sebagai sasaran dari Humas. 4) Operasional Humas sebagai pembinaan hubungan harmonis diantara organisasi dengan publik, mencegah adanya rintingan berupa psikologis yang timbul dari pihak manapun.

Ketika dilihat dari fungsinya maka *public relation* harus menumbuhkan dan juga melakukan pengembangan antara kedua belah pihak baik dilakukan di ranah internal dan juga di ranah eksternal untuk melakukan penanaman pengertian, penumbuhan motivasi, aktif mengenai partisipasi sehingga tercipta iklim pendapat ataupun opini public yang pasti menguntungkan *corporate* ataupun perusahaan. Tujuan utama dari *public relation* agar bisa mempengaruhi perilaku dengan adanya dialog antara semua golongan. Antara persepsi, sikap dan juga opini terhadap kesuksesan dari lembaga.

Pelaksanaan tugas yang memiliki banyak macam yang sesuai dengan perannya dan kedudukannya merupakan salah satu dari tujuan proses organisasi yang dinamis. Dilihat dari keefektivan secara individual dan keefektivan secara organisasi bisa dilihat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran serta kedudukannya, sehingga pengukuran efektivitas *public relation* harus diukur.

Menurut Soedarmayanti Suherla (2015), mengemukakan bahwa kualitasnya, kuantitasnya dan waktunya adalah suatu target yang saling berkaitan untuk mampu dicapai dengan semaksimal mungkin melalui unjuk

kerja. Lalu pengertian efektivitas Menurut handoko Suherlan (2015) efektivitas merupakan tujuan yang sudah ditetapkan bagian dari tujuan yang telah tepat. Adapun pengertian efektivitas menurut Soejadi Suherlan (2015) adalah mutu berhubungan dengan pencapaian target yang sudah ditentukan seperti (target *achieved* semisal produksi *eksport* yang beraneka ragam, *income* yang mengalami pertambahan) yang target tersebut tercapai dengan tepat dilaksanakan itulah yang disebut berhasil guna (efektif).

Efektivitas menurut The Liang Gie Setiawan (2014), efek atau sebuah akibat yang sesuai kehendak terkandung dari katak efektivitas. Sehingga perbuatan yang menimbulkan akibat dari kehendak bagian dari keefektivan. Menurut Siagian (2003) efektivitas adalah ketepatan waktu digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang ataupun jasa dengan cara memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan sarana dan juga prasarana sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Menurut Handayaniingrat (Huvat, 2015) efektivitas adalah rencana yang sudah ditentukan itu harus sesuai dengan rencana dan tujuan yang harus dicapai. Jadi tidak efektif terjadi ketika sasaran dan juga penetapan tujuan tidak

sesuai dengan penentuan waktu. Menurut Sters dalam Aulia (2019) mengemukakan bahwa tujuan dan sasaran terpenuhi ketika sumber daya serta sarana dari sistem yang terdiri dari jangkauan usaha ataupun program yang tidak melumpuhkan cara dan sumber daya tersebut serta tidak memberikan tekanan yang bisa dikatakan tidak wajar dalam melaksanakannya.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005) dalam bukunya transformasi pelayanan publik mendefinisikan efektivitas merupakan dalam pelaksanaannya tidak boleh terdapat tekanan maupun ketegangan di dalam sebuah organisasi maupun sejenisnya. Ketika tidak terjadi hal tersebut dapat dikatakan organisasi tersebut memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya, fungsinya dalam pengoperasian kegiatan ataupun misinya. Terdapat tiga unsur dalam efektivitas menurut Kuniawan (2005) yaitu 1) Pencapaian tujuan yaitu penentuan mengenai tujuan dan sasaran tercapai maka kegiatan itu bisa dikatakan efektif. 2) Ketetapan waktu, yaitu penentuan waktu tersebut ketika dijalankan tercapai maka bisa dikatakan efektif. 3) Manfaat yaitu, efektifnya kegiatan itu ketika kegiatan itu dapat memberikan manfaat baik organisasi ataupun masyarakat.

Dalam mencapai tujuan mengenai seberapa besar biaya yang sudah dikeluarkan tidak berkaitan dengan efektivitas, itu merupakan hal terpenting yang harus dicatat. Efektivitas melihat tentang pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam sebuah program. Menurut Hidayat (1986) menyatakan pencapaian antara kuantitas, kualitas dan juga waktu dari target merupakan ukuran dari efektivitas. Semakin besar jumlah persentase dari target pencapaian maka akan semakin tinggi keefektifitasnya. Menurut Permata Weshha dalam Masyita (2016) mengemukakan efektivitas adalah menciptakan guna yang sesuai harapan sesuai dengan kemampuan dari keberhasilan suatu kerja. Mempertimbangkan ekonomi, mempertimbangkan fisiologi, mempertimbangkan psikologi dan mempertimbangkan sosial merupakan empat macam pertimbangan yang perlu dilakukan untuk melihat efektivitas kerja secara umum.

Menurut *Airport Service* dalam Cheeweenk (2010) mengemukakan efektivitas merupakan penetapan tujuan dengan kinerja dari unsur-unsur manajemen merupakan sebuah bandingan. Menurut Mahmudi (2005) efektivitas merupakan organisasi ataupun program dilihat dari pencapaian

tujuannya yang berkaitan dengan *output* dan tujuan yang semakin besar memiliki kontribusi ataupun sumbangsih. Menurut Abdurahmat dalam Erwis (2012) efektivitas adalah memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan prasarana dengan jumlah yang ditentukan yang dilakukan secara sadar yang sudah ditetapkan sebelumnya akan diperoleh sejumlah pekerjaan yang waktunya sesuai penentuan. Menurut Hidayat dalam Erwis (2012) efektivitas adalah pencapaian yang sesuai dengan ukuran yang menjelaskan tentang target berupa target muantitas, target kualitas maupun target dari waktu.

Salah satu lembaga yang ada dan juga berfungsi untuk memberikan pelayanan yaitu Lembaga Kepolisian. Dalam hal penegakan hukum, melakukan perlindungan kepada masyarakat, mengayomi, pelayanan berupa bimbingan masyarakat atau tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas bersifat sosial yang setiap harinya berhadapan di masyarakat merupakan fungsi dari kepolisian. Sehingga sudah seharusnya dan selayaknya sentuhan dari aspek berupa kehumasan atau *public relations* kepada lembaga kepolisian harus melekat.

Satuan Lalu Lintas Polres Bone dalam menjalankan fungsinya tentang *public relations* membuat sebuah

bidang yang menangani hal tersebut. Membantu pimpinan dalam melakukan pembinaan dan pengamanan dan menciptakan hubungan harmonis antara organisasi dan masyarakat merupakan kedudukan dari *public relations*. Pelaksanaan *public relations* di sebuah organisasi agar menumbuhkan dan juga bisa menerapkan nilai baik atau pencitraan yang positif Satuan Lalu Lintas Polres Bone di masyarakat maka kinerja *public relations* bisa dijadikan landasan. Sedangkan dilihat dari kedudukan humas secara internalnya sebagai jembatan komunikasi antar pimpinannya dengan pegawai-pegawainya dan untuk eksternalnya menjadi perantara antara organisasi dengan pihak dari luar.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sadjijono menjelaskan polisi itu organ atau lembaga pemerintahan yang berada di negara. Istilah kepolisian yang dikatakan sebagai organ dan juga dikatakan sebagai fungsi. Polisi dikatakan sebagai organ bahwa

kepolisian yang diberikan tugas dan juga memiliki kewenangan yang merupakan isi dari undang-undang yang didalamnya mengatur tentang kelembagaan pemerintahan yang terorganisasi dan mempunyai struktural di dalam ketatanegaraan.

Observasi awal yang sudah dilakukan terdapat permasalahan seperti tingkat kepatuhan masyarakat Bone dalam berkendara yang dapat dikatakan masih kurang, bisa dilihat angka atau jumlah kendaraan yang ditilang dikarenakan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau disingkat SIM dan tegolong berada tingkat yang masih tinggi di kabupaten Bone sehingga dapat disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone belum sepenuhnya efektif, tingkat dari kesadaran dari masyarakat Bone bisa dikatakan masih kurang mengenai pentingnya memiliki SIM pada saat berkendara, sehingga untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara maka Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone perlu memperhatikan *public relation* yang dilakukan sebagai jembatan antara organisasi dan masyarakatnya dalam hal penyelenggaraan di bidang kepolisian. Maka dari itu fungsi-fungsi preventif

dan fungsi represif bisa berjalan ketika *public relation* yang dilakukan sudah baik dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.

## METODE PENELITIAN

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dua (2) bulan mulai dari 08 Desember 2021 s/d 08 Februari 2022. Adapun lokasi atau tempat penelitian yaitu Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone, jalan Yos Sudarso No. 27 Watampone, kode Pos 92715, Kabupaten Bone.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu masalah yang akan diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara terstruktur.

Penentuan informan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dipilih agar bisa menentukan para informan yang didasarkan pada orang-orang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat sesuai dengan yang dimaksud yaitu tentang informan penelitian adalah permasalahan penelitian. Pemilihan informan ini diambil dengan pertimbangan tertentu, dengan

mempertimbangkan bahwa orang yang dipilih sebagai informan ini merupakan orang yang mengetahui tentang efektivitas pelaksanaan *public relation* di satlantas polres bone. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang valid.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik pengabsahan data dengan cara perpanjangan masa penelitian, pencermatan pengamatan dan triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data melalui wawancara, reduksi data, uji *confitmanbality* dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada poin hasil penelitian, berikut akan dibahas:

### **Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dilihat dari adanya *public relation* dalam pemberian informasi pembuatan SIM kepada masyarakat, bentuk *public*

*relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wujud pemberian informasi sudah sangat baik, dilakukan dengan transparan, efektif dan mudah dipahami, hal ini sebagai upaya atau langka preventif Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat salah satunya tidak memiliki SIM.

Humas Sat Lantas Polres Bone atau biasa disebut Pemandu di Humas Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone juga memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM selama melakukan pembuatan SIM. Adapun tugas pokok Humas Polres adalah sebagai berikut: 1) Pembinaan terhadap kegiatan humas yang dilaksanakan di lingkungan Polres. 2) Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan

kemitraan dengan media massa berikut komponen nya. 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita di lingkungan Polres. 4) Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas di lingkungan Polres. 5) Perencanaan dan pengadministrasian umum di lingkungan Humas Polres. 6) Menyelenggarakan peliputan, pemantaun dan evaluasi kegiatan program Humas Polres sehingga masyarakat tidak perlu bingung untuk melakukan pengurusan karena Humas Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone akan mengarahkan masyarakat selama proses pembuatan.

Bentuk *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu dengan melakukan sosialisasi, kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur dan tak lupa pentingnya memiliki SIM bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIM dan pemberitahuan bahwa masyarakat yang tidak memiliki SIM maka akan ditilang. Tilang

merupakan kata lain dari bukti pelanggaran, saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal nya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang. Jika dilihat dari pekerjaan masyarakat yang melanggar Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020 yaitu didominasi oleh pelajar.

Namun adanya *public relation* yang dilakukan sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat terkait pembuatan SIM masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran, dengan melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sebagai bentuk tindak lanjut dari kesalahan yang dilakukan. *Public relation* yang dilakukan dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar dengan pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Masih banyaknya masyarakat Bone yang ditilang akibat dari tidak memiliki SIM.

Namun hasil wawancara dengan masyarakat berbeda karena *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone belum terlaksana secara merata karena masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone.

Tujuan *public relation* yaitu agar masyarakat Bone memiliki SIM belum tercapai karena tujuan *public relation*

untuk penanggulangan perilaku masyarakat yang tidak taat dan biasanya melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari masyarakat itu sendiri yang masih bersifat acuh maupun tidak peduli dengan aturan yang ada, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda. Berikut 2021 rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021.

**Tabel 1.**  
**Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Baru dan Peningkatan Golongan**

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	306	559	0	2	7	11	1	24
Februari	154	267	0	0	3	10	0	23
Maret	298	438	0	1	9	6	1	30
April	320	409	0	0	5	5	0	23
Mei	293	502	0	0	5	8	2	33
Juni	383	771	0	1	7	15	3	39
Juli	465	584	0	1	7	13	4	39
Agustus	251	474	0	0	10	11	0	23
September	335	724	0	0	10	3	0	42
Oktober	359	750	0	1	19	7	0	36
November	449	925	0	1	9	10	2	45
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.613</b>	<b>6.403</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>13</b>	<b>357</b>

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Tabel 1 diatas menjelaskan mengenai rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021 SIM baru dan peningkatan golongan. SIM baru yang produksinya tertinggi yaitu SIM C berjumlah 6.403, kedua adalah SIM A dengan jumlah 3.613, sedangkan pada SIM D tidak terdapat pembuatan SIM baru. Peningkatan golongan SIM

tertinggi adalah pada golongan BIIU berjumlah 357, golongan BIU berjumlah 99, golongan BI berjumlah 91, golongan BII berjumlah 13, dan terendah adalah pada golongan AU berjumlah 7.

Berikut Rekap bulanan produksi SIM/Gol Tahun 2020 untuk perpanjangan sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Rekap Bulanan Produksi SIM/Gol Tahun 2021 SIM Perpanjangan**

Uraian	Sim Baru			Peningkatan Golongan				
	A	C	D	AU	BI	BIU	BII	BIIU
Januari	141	1	0	9	0	18	246	0
Februari	123	0	0	5	0	18	219	0
Maret	152	0	0	5	0	18	336	0
April	180	1	1	4	0	14	411	0
Mei	174	0	0	8	0	18	369	0
Juni	332	2	2	31	2	41	675	0
Juli	227	0	0	8	0	18	447	0
Agustus	180	2	0	6	0	21	351	0
September	237	0	3	3	0	11	438	0
Oktober	229	0	1	2	0	15	477	0
November	136	0	0	7	0	14	384	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.111</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>2</b>	<b>206</b>	<b>4.353</b>	<b>0</b>

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, 2021

Tabel tersebut memperlihatkan mengenai rekap bulanan produksi SIM/Gol tahun 2021 SIM perpanjangan yang paling tinggi untuk SIM jenis BII sebanyak 4.353 dan paling terendah BIIU yang tidak ada sama sekali.

### **Ketetapan Waktu**

Ketepatan waktu yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan *public relation* sesuai dengan waktu yang ditentukan, berikut akan dibahas secara terperinci. Disimpulkan bahwa *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat pada waktunya. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone memberikan informasi secara langsung dan melalui media sosial, media massa seperti

radio, surat kabar (koran), *Instagram*, *Facebook* dan lain sebagainya. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan bagi masyarakat kabupaten Bone. Ketepatan waktu juga diukur dengan prosedur yang disampaikan seperti standar waktu yang ditentukan. Standar waktu terdiri dari pendaftaran 10 menit, ujian teori atau Avis 30 menit, praktek 45 menit, *entry* data, tanda tangan, sidik jari, foto atau cetak kemudian ambil SIM yaitu 30 menit dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum terlalu paham mengenai pembuatan SIM. Untuk memudahkan masyarakat saat ini pembuatan SIM bisa dilakukan dengan cara *online*. SIM *online* merupakan

pengurusan yang tidak harus antri, bisa dilakukan di Satpas mana saja, tidak perlu sesuai dengan domisili yang bisa dilakukan pendaftaran melalui <http://sim.korlantas.polri.go.id/devregist> rasi.

Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam melakukan *public relation* berupa informasi yang diberikan tentang pembuatan SIM tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM memakan waktu yang lama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone harus terus membenahi segi pelayanan yang diberikan agar informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan pada saat pelayanan.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan *public relation* dalam pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone dapat dilihat dari ketepatan waktunya, maka Satuan Lalu Lintas Polres di Kabupaten Bone perlu melakukan perbaikan terus menerus agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama.

## **Manfaat**

Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari manfaat yang dirasakan bagi organisasi dan masyarakat, kesesuaian keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM, peningkatan yang perlu dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dalam hal *public relation* pembuatan SIM yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone, berikut akan dibahas secara terperinci.

Manfaat adanya pelaksanaan *public relation* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat Kabupaten Bone agar patuh lalu lintas dan diharapkan mampu mengurangi tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Bone dan dengan adanya pemberian informasi dalam pelayanan SIM mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif.

Menurut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone bahwa *public relation* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam pembuatan SIM sehingga memberikan manfaat yang tepat karena hak masyarakat untuk

mendapatkan informasi, Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial, seperti surat kabar (koran), radio, *Instagram*, *Facebook* dan berbagai situs media sosial lainnya, pelaksanaan dalam proses pelayanan penerbitan SIM sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai UU No.22 tahun 2009 untuk mendapatkan SIM, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh dari Pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan harus memenuhi semua persyaratan dalam penerbitan SIM.

Hasil wawancara dengan masyarakat yaitu *public relation* Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone harus ditingkatkan kedepannya sesuai dengan keinginan masyarakat Bone. Pemberian informasi harus lebih baik dan progress, perlu peningkatan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang benar dan tingkat disiplin yang baik agar waktu pelaksanaan berjalan sesuai yang telah ditentukan dan memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat

dan peran masyarakat juga dibutuhkan karena masyarakat harus sadar bahwa pembuatan SIM itu penting sehingga meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone serta perlunya kedekatan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone dengan masyarakat terkhusus perannya sebagai Humas.

### KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini yaitu 1) pencapaian tujuan *public relation* di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone terdiri dari pemberian sosialisasi pentingnya SIM kepada masyarakat, kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA sebagai upaya atau langkah preventif, memberikan informasi seputar prosedur, mekanisme dan persyaratan dalam pembuatan SIM ketika melakukan pembuatan SIM secara langsung, namun tujuan *public relation* belum terlaksana secara merata karena beberapa masyarakat tidak tahu bentuk *public relation* yang dilakukan dalam pembuatan SIM belum tercapai karena masyarakat masih melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki SIM. 2) Ketetapan waktu *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone sudah tepat pada waktunya,

memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan, memberikan informasi secara langsung. Namun beberapa masyarakat merasa pelaksanaan *public relation* yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena dalam pembuatan SIM membutuhkan waktu yang lama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone harus terus membenahi segi pelayanan. 4) Manfaat dari *public relation* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone belum tercapai sepenuhnya karena kesadaran berlalu lintas masih kurang dan tingkat atau jumlah tilang di kabupaten Bone masih tinggi dan beberapa masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya sosialisasi atau pemberian informasi langsung ke masyarakat dan pemberian informasi pembuatan SIM tidak sesuai dengan pengurusan karena melebihi dari satu hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriani. (2018). *Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi: Studi Pada Kantor Sat Lantas Kabupaten Bungo* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Aulia, W. (2019). *Efektivitas Program Operasi Gabungan Satlantas Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- BPS. (2021). *Bone dalam Angka 2021* (1st ed.). BPS. <https://doi.org/1102001.7311>
- Cheeweenk, H. C. (2010). *Efektivitas Dan Efisiensi Kerja*.
- Erwis, N. A. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Handaru, S. (2007). Efektivitas Komunikasi Humas dalam Sosialisasi Program SIM Online oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. *Jurnal E-Komunikasi* 5(1).
- Hidayat. (1986). *Konsep Dasar Dan Pengertian Produktivitas Serta Interpretasi Hasil Prisma*. Jakarta: LP3ES.
- Huvat. (2015). Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM Di Kecamatan Lahan Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 3(1).
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Masyita, S. (2016). Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-KTP Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Bongaya* 1(1).
- Robani, B. J. (2016). *Fungsi Program Dikmas Lantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas* (Skripsi, Universitas Pasundan).

- Setiawan, H. (2014). Efektifitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya). *Jurnal Unair*, 3(1).
- Siagian, S. P. (2003). *Peran Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: CV Gunung Agung.
- Suherlan, Y. (2015). *Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Efektivitas Kerja UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat*. (Skripsi, Universitas Pasundan).
- Yulianita, N. (1999). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.